

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori strategi menurut J. Koteen, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam meningkatkan perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kota Padang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya skala penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di DPMPTSP Kota Padang dari tahun ke tahun. Namun Pelaksanaan strategi yang dilakukan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya di lapangan.

Temuan utama dari keempat dimensi strategi menunjukkan bahwa strategi organisasi tercermin dari perumusan visi misi dan tujuan yang selaras dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, hal ini dapat didorong dengan meningkatnya skala ekonomi yang ada di Kota Padang, terutama dalam meningkatkan kesadaran pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Strategi program terlihat pada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut seperti MPP INDAH, Segar Sesi, dan DODORIN yang tidak hanya menimbulkan kesadaran dan ketertarikan pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusaha tetapi juga meningkatkan pemahaman para pelaku usaha yang ada di Kota

Padang terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha. Hal ini juga ditunjukkan dari meningkatnya skala penerbitan NIB dari tahun-ke tahun di DPMPTSP Kota Padang. Namun, rendahnya sosialisasi dan kurangnya kontinuitas program menjadi kendala yang dihadapi.

Dalam aspek strategi sumber daya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang telah memanfaatkan sarana prasara dengan optimal, namun diperlukan pengalokasian anggaran program secara khusus untuk menjaga kontinuitas program, serta peningkatan dan penambahan jumlah SDM juga diperlukan agar program dapat berjalan optimal. Strategi kelembagaan juga menunjukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang telah memiliki struktur dan kewenangan yang sesuai peraturan, namun implementasi kebijakan seperti SOP dalam pelaksanaan program seperti MPP INDAH belum dijalankan dengan konsisten dan terpantau dengan baik, serta koordinasi antar opd terkait output dari program juga belum berjalan optimal. Secara keseluruhan, strategi-strategi yang dijalankan telah sesuai dengan pendekatan J.Koteen, namun optimlisasi dalam aspek implementasi terutama dalam aspek dukungan sumber daya dan kelembagaan dibutuhkan agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara perencanaan strategis dan kemampuan operaional organisasi. DPMPTSP telah memiliki arah yang benar secara konspetual yang mana juga dibuktikan dengan tercapai tujuan dari pelaksanaan progam/kegiatan, namun implementasinya memerlukan penyempurnaan, integrasi antar aspek strategi, serta evaluasi berkala berbasis indikator kinerja.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang menyusun langkah strategis yang lebih operasional dalam meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. Rekomendasi ini disusun mengacu pada teori strategi J. Koteen, yang menekankan empat aspek utama yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan.

Dalam jangka pendek, DPMPTSP perlu memperkuat aspek strategi organisasi dengan penajaman SOP layanan NIB agar lebih seragam dan terukur sesuai visi pelayanan prima. Pada level strategi program, sosialisasi jemput bola melalui program Door to Door Izin atau kegiatan di kecamatan/kelurahan dapat segera dijalankan untuk meningkatkan literasi pelaku UMK mengenai manfaat NIB. Dari sisi sumber daya, pelatihan teknis OSS bagi pegawai frontliner sangat penting untuk memastikan kesiapan mereka dalam mendampingi pelaku usaha. Sedangkan dari aspek kelembagaan, pembentukan unit khusus layanan NIB di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan SOP tersendiri menjadi langkah nyata untuk mempercepat pelayanan.

Dalam jangka menengah, arah strategis DPMPTSP perlu diperkuat melalui penyusunan roadmap organisasi yang menargetkan minimal 50% UMK di Kota Padang memiliki NIB. Program seperti business clinic dan pelatihan digitalisasi usaha di MPP INDAH perlu dijalankan secara rutin agar strategi program lebih berdampak pada peningkatan kesadaran dan keterampilan pelaku usaha. Dukungan

sumber daya dapat diwujudkan dengan pengembangan dashboard monitoring NIB yang menampilkan capaian setiap kecamatan secara real-time. Selanjutnya, pada aspek kelembagaan, pembentukan forum koordinasi lintas OPD bersama Dinas Koperasi dan UKM perlu dilakukan secara formal agar data UMK yang telah memiliki NIB lebih sinkron.

Dalam jangka panjang, DPMPTSP harus menegaskan strategi organisasi dengan menetapkan target penuh kepemilikan NIB oleh seluruh UMK pada tahun 2030, sehingga sejalan dengan visi Kota Padang yang berdaya saing. Dari sisi program, perlu dibangun ekosistem OSS yang terintegrasi dengan layanan daerah lain seperti izin lingkungan, izin bangunan, dan perpajakan daerah agar NIB benar-benar menjadi identitas tunggal usaha. Dukungan sumber daya dapat diwujudkan dengan penerapan sistem sertifikasi kompetensi bagi pegawai DPMPTSP untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, penyusunan regulasi daerah yang memberikan insentif berbasis NIB, seperti prioritas akses pembiayaan, keringanan retribusi, atau kemudahan program UMKM, akan memperkuat daya tarik pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas usahanya.

Dengan penerapan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang terintegrasi dalam kerangka teori J. Koteen tersebut, diharapkan peningkatan pengurusan NIB di Kota Padang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada penguatan ekosistem usaha mikro kecil yang berkelanjutan.